

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak antara $0^{\circ} 59''$ - $2^{\circ} 28,6''$ Lintang Selatan dan antara $100^{\circ} 19''$ - $101^{\circ} 18''$ Bujur Timur dengan luas daerah 5.749,89 Km². Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah berbukit- bukit dengan ketinggian berkisar 0 – 1.000 Mdpl, dan memiliki 57 pulau serta dialiri sebanyak 17 sungai dengan 11 sungai besar dan 6 sungai kecil (sumber Wabsite Profil Kab. Pesisir Selatan).

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), terdapat 17 sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat di Kab. Pesisir Selatan dengan nama Daerah Aliran Sungai (DAS) Silaut – Tarusan, dengan total panjang sungai 9.399,65 Km.

Sugai-sugai yang berada pada di Kabupaten Pesisir Selatan banyak mengalami daya rusak air yang cukup memprihatinkan akibat dari banjir yang kerap terjadi. Sehingga sungai tersebut mengalami perubahan aliran sungai yang mengancam pemukiman masyarakat, fasilitas umum, bahkan sawah/perkebunan masyarakat di sekitar aliran sungai. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah dan akan melakukan berbagai upaya agar Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Infrastruktur aliran sungai yang baik dengan kegiatan pembangunan perkuatan tebing sungai dan pembangunan prasarana sungai.

Namun sejauh ini kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur sungai tersebut seringkali tidak dapat mencapai sasaran waktu pekerjaan yang diinginkan. Perencanaan pembangunan yang telah disusun lebih dulu, terkadang mengalami keterlambatan pekerjaan konstruksi dan perbedaan antara waktu yang direncanakan dengan pelaksanaannya dilapangan. Oleh sebab itu harus ada upaya-upaya yang dilakukan agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Salah satu upaya dan langkah utama yang harus dilakukan adalah mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan proyek infrastruktur sungai kewenangan Provinsi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA BK) Provinsi Sumatera Barat memiliki 23 paket tender pekerjaan pembangunan infrastruktur sungai selama periode tahun anggaran 2020 sampai 2023 yang berada di Kab. Pesisir Selatan. Dari 23 paket tersebut terdapat 8 paket pekerjaan yang mengalami penambahan waktu, artinya 34,78% pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur sungai di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami keterlambatan, dan 65,22% yang sukses dari segi waktu penyelesaiannya.

Keterlambatan pekerjaan konstruksi di Sumatera Barat diakibatkan oleh kekurangan material, lambatnya pembebasan lahan, manajemen lapangan kontraktor, perencanaan dan penjadwalan yang tidak efektif, kesulitan keuangan kontraktor, kesalahan desain, kurangnya peralatan, rendahnya sumber daya manusia kontraktor, kondisi lapangan yang tidak terduga, dan peralatan yang rusak
(Rita dkk., 2019)

Keterlambatan atau tertundanya penyelesaian proyek telah menjadi suatu penyakit menurun dan menahun dalam dunia konstruksi. Sangat penting untuk menciptakan kesadaran akan sejauh mana keterlambatan tersebut dapat mempengaruhi penyelesaian proyek. Sebuah proyek konstruksi umumnya dinyatakan sukses ketika selesai tepat waktu, sesuai anggaran, sesuai spesifikasi, dan kepuasan stakeholder (*Gunduz dkk., 2013*).

Keterlambatan proyek bisa berasal dari penyedia jasa maupun pengguna jasa, ataupun kejadian-kejadian diluar kendali pemilik dan kontraktor yang berdampak pada penambahan waktu dan biaya diluar rencana. Bila keterlambatan berasal dari kontraktor (Penyedia Jasa), maka kontraktor bisa dikenai denda, begitu juga bila keterlambatan berasal dari penggunaan jasa, maka pengguna jasa akan membayar yang ditanggung penyedia jasa, yang jumlahnya ditetapkan dalam kontrak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi memberikan efek domino terhadap proyek dan lingkungan sekitarnya (*Carlo Dkk., 2019*).

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang menjadi faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek Pembangunan Infrastruktur Sungai Kewenangan Provinsi di Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Apa faktor dominan penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek Pembangunan Infrastruktur Sungai Kewenangan Provinsi di Kabupaten Pesisir Selatan ?

3. Bagaimana solusi untuk mencegah atau meminimalisir potensi keterlambatan yang terjadi pada pelaksanaan proyek Pembangunan Infrastruktur Sungai Kewenangan Provinsi di Kabupaten Pesisir Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek Pembangunan Infrastruktur Sungai Kewenangan Provinsi di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menganalisis faktor dominan penyebab keterlambatan proyek Pembangunan Infrastruktur Sungai Kewenangan Provinsi di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memberikan solusi untuk mencegah atau meminimalisir potensi keterlambatan yang terjadi pada pelaksanaan proyek Pembangunan Infrastruktur Sungai Kewenangan Provinsi di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kajian faktor keterlambatan proyek difokuskan pada faktor teknis dan non teknis selama proses pelaksanaannya, mulai awal pekerjaan proyek hingga proyek selesai.
2. Kajian faktor keterlambatan proyek difokuskan pada pelaksanaan proyek Pembangunan Infrastruktur Sungai Kewenangan Provinsi di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kajian faktor keterlambatan proyek difokuskan pada proyek yang dikerjakan dengan nilai antara Rp.300.000.000,- sampai dengan Rp.3.500.000.000,- Rupiah.

4. Proyek yang akan diteliti adalah proyek yang dilaksanakan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.
5. Responden dalam penelitian ini yaitu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Konsultan Pengawasan, dan Kontraktor.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Menambah wawasan bagi penulis tentang faktor-faktor keterlambatan proyek konstruksi.
2. Dapat menjadi referensi dan menambah ilmu pengetahuan tentang faktor keterlambatan pada proyek pembangunan infrastruktur sungai.
3. Dapat menjadi evaluasi bagi kontraktor untuk meminimalisir keterlambatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur sungai.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

BAB I : **Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan.

- BAB II : Tinjauan Pustaka
- Pembahasan tentang teoritis dari ruang lingkup penelitian yang meliputi pembahasan tentang proyek secara umum, Pembahasan tentang keterlambatan dan kajian terdahulu terkait dengan faktor keterlambatan pelaksanaan proyek.
- BAB III : Metodologi Penelitian
- Pembahasan tentang tahapan yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi metode pengumpulan data, sampel penelitian dan tahapan analisis data.
- BAB IV : Analisa dan Pembahasan
- Berisikan tentang tahapan analisis data menggunakan *software* statistik SPSS versi 2.0.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran
- Kesimpulan memuat hasil atau jawaban dari permasalahan penelitian, sedangkan saran berisi saran untuk meminialisir permasalahan dari penelitian.